

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peristiwa Perang Enam Hari pada tahun 1967 berefek besar pada Bangsa Palestina, setelah perang tersebut, setengah wilayah Palestina yaitu Tepi Barat dan Jalur Gaza dikuasai Israel¹. Setelah Perang Enam Hari, Israel mempunyai kekuasaan terhadap warga Palestina. Kekuasaan adalah hubungan antara orang-orang, bisa berupa hubungan antara dua orang atau lebih. Salah satu pihak atau orang tersebut memiliki kekuatan atau kekuasaan yang lebih dari pihak atau orang lainnya².

Negara Israel menggunakan kekuasaannya untuk menekan Bangsa Palestina dalam 4 bentuk yaitu, ekonomi, sosial, ideologi, dan politik. Dalam ekonomi Bangsa Palestina yang bekerja pada pemerintah Israel berjumlah 250.000 orang dan bekerja sebagai buruh. Perlakuan mereka sangat berbeda dengan rekan sekerja mereka yang warga asli Israel. Mereka mendapatkan upah 50 sampai 70 persen lebih rendah untuk pekerjaan yang sama³. Pemerintah Israel melarang buruh-buruh yang berasal dari Palestina untuk dapat keluar secara bebas pada malam hari, kegiatan mereka diatur, pelanggarnya akan dipenjarakan, buruh-buruh tersebut tidak dapat melakukan apa-apa karena tekanan dari pemerintah Israel.⁴ Secara sosial Bangsa Palestina diperlakukan sebagai orang

¹Yashar Keramati, *Twenty Years in the Making : Palestinian Intifada of 1987* (Nebula; 2007, Hal 107)

² Robert A. Dahl, *The Concept of Power*, Department of Political Science, Yale University (1957), hal 3

³ Ruth Margolies Beitler. *The Intifada: Palestinian Adaptation to Israeli Counterinsurgency Tactics*.(Terrorism & Political Violence 7.2 1995 Hal 56)

⁴Shelley, Toby, and Ben Cashdan. *Palestine: Profile of an Occupation*.(London: Zed Books Ltd., 1989 Hal 46)

asing di tanah air mereka sendiri, serta intimidasi dari pemerintah Israel pada Bangsa Palestina, mereka selalu dicurigai dan dianggap berbahaya.⁵ Secara Ideologi keberadaan mereka sebagai sebuah Bangsa tidak diakui pemerintah Israel sedangkan secara Politik, Israel selalu menghalangi usaha Bangsa Palestina untuk mendapatkan status merdeka. Israel menekan Bangsa Palestina di wilayah yang mereka duduki pada tahun 1967 agar menuruti otoritas Israel.

PLO (*Palestina Liberation Organization*)⁶ yang merupakan gabungan dari berbagai macam organisasi pembebasan Palestina lahir sebagai organisasi yang berjuang membela hak-hak bangsa Palestina yang ditekan karena adanya kekuasaan yang dimiliki oleh Israel. Namun rakyat Palestina sendiri merasa kurang puas dengan kinerja PLO, karena merasa PLO yang menjadi satu-satunya perwakilan Bangsa Palestina yang diakui PBB semakin terdesak dan tidak berdaya. PLO semakin terpojok dengan pengusiran oleh tentara Kerajaan Hasyimiyah di Yordania, dan wafatnya Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser yang merupakan tokoh terkemuka dalam melawan Israel. Tahun 1979 Mesir berdamai dengan Israel, dimana Mesir merupakan kekuatan utama dalam perjuangan melawan Israel, hal-hal tersebut membuat PLO mengganti strategi perjuangannya menjadi usaha-usaha diplomasi.⁷

Bentuk perlawanan Bangsa Palestina yang berasal dari tekanan dari Negara Israel memicu perlawanan dari Bangsa Palestina yaitu Intifada⁸. Intifada adalah perlawanan terhadap Israel yang menduduki wilayah Tepi Barat dan Jalur

⁵ Merari, Ariel, Prat, Tamar, and David Tal. *The Palestinian Intifada An Analysis of a Popular Uprising After Seven Months.* (Terrorism & Political Violence 1.2 1989 Hal 177)

⁶PLO singkatan dari *Palestine Liberation Organization* yang terbentuk pada tahun 1964. PLO diakui PBB sebagai entitas perwakilan bangsa Palestina

⁷ Imam Khomeini, *Palestine*. Diterjemahkan oleh Muhammad Anis Maulachela, *Palestina: Tragedi Keterhinaan kaum Muslim*, (Jakarta: Zahra publishing House, 2009) hal xxxi

⁸<http://www.mideastweb.org/Middle-East-Encyclopedia/intifada.htm>

Gaza pada tahun 1987⁹. Intifada adalah bentuk baru perlawanan Bangsa Palestina terhadap Israel, bukan berupa perang atau aksi terror, namun gerakan perlawanan secara kolektif dan massal oleh masyarakat Palestina terhadap Israel¹⁰.

Salah satu pemicu Intifada adalah kejadian pada tanggal 31 Mei 1987, saat itu tentara Israel melakukan inspeksi jam malam di *Kemah Pengungsian* pengungsian di Balata. Awalnya para wanita yang berada di kemah pengungsian tersebut melakukan perlawanan dan akhirnya diikuti oleh para pria sehingga memaksa tentara Israel mundur dari kemah pengungsian tersebut. Enam bulan kemudian, November 1987, gelombang kekerasan mencuat dari Kemah Pengungsian Jibaylla dimana untuk pertama kalinya gelombang massa yang begitu besar berusaha menerobos pagar pembatas dan melawan dengan batu serta tongkat¹¹. Perlawanan ini dipicu oleh truk Israel yang menabrak dua mobil van yang berisi pekerja Palestina, mengakibatkan 4 orang Palestina meninggal saat kejadian tersebut. Perlawanan ini akhirnya berkembang menjadi Intifada Pertama¹².

Intifada Pertama adalah gerakan perlawanan melawan pendudukan Israel yang berlangsung dari tahun 1987 dan berakhir pada tahun 1993. Gerakan Intifada adalah gerakan yang hanya terjadi di daerah pengungsian namun menyebar kedaerah-daerah paling terpencil di Tepi Barat dan Gaza, gerakan yang identik dengan perlawanan menggunakan batu dalam melawan militer Israel, dimana massa yang terlibat berasal dari kaum muda, tua, anak-anak, dan berasal dari

⁹ <http://www.icsresources.org/content/factsheets/ArabIsraeliTimeline.pdf>

¹⁰ http://www.academia.edu/907969/THE_INTIFADA_CAUSES_CONSEQUENCES_AND_FUTURE_TRENDS

¹¹ Eitan Y. Alimi, *Israeli Politics and the First Palestinian Intifada*, (New York: Routledge, 2007) hal.1

¹² Intifada berasal dari bahasa Arab yang berarti 'menggetarkan', 'mengguncang'

berbagai latar belakang pekerjaan¹³. Intifada Pertama mendorong terjadinya ruang negosiasi dengan Israel yang menghasilkan Oslo Accord¹⁴. Oslo Accord adalah resolusi konflik antara Israel dan Palestina yang diwakilkan oleh PLO (Palestina Liberation Organization) sebagai satu-satunya organisasi yang mewakili masyarakat Palestina yang diakui PBB¹⁵. pada tahun 1993 di Oslo, Norwegia. Salah satu isi dari Oslo Accord adalah kesempatan berdirinya negara Palestina dalam jangka waktu 5 tahun sesuai yang tertulis dalam artikel 1 Oslo Accord¹⁶:

Article I
Aim of the negotiations :

“The aim of the Israeli-Palestinian negotiations within the current Middle East peace process is among other things, establish a Palestinian Interim Self-Government Authority. The elected Council, for the Palestinian people in the West Bank and the Gaza Strip. For a transitional period not exceeding five years, leading to a permanent settlement based on Security Council Resolutions 242 and 338”.

Intifada Kedua terjadi pada tahun September 2000 yang dipicu kedatangan Ariel Sharon¹⁷ bersama delegasi partai Likud dan diiringi ratusan polisi anti kesuruhan Israel ke *Temple Mount*. Mesjid Al-Aqsa salah satu ritus suci umat muslim berada dalam kompleks *Temple Mount*. Inilah yang dianggap sebagai salah satu pemicu Intifada Kedua. Karena masyarakat Palestina memandang tindakan Ariel Sharon sebagai tindakan yang menegaskan secara tidak langsung Temple Mount adalah wilayah kekuasaan Israel. Tidak lama setelah Ariel Sharon meninggalkan kompleks itu, ratusan rakyat Palestina yang marah memicu

¹³ Jim Lederman, Dateline Westbank : Interpreting the Intifada, Foreign Policy, No. 72 (Autumn, 1988) Hal. 230

¹⁴Roberts, Adam; Garton Ash, Timothy, *Civil Resistance and Power Politics: The Experience of Non-violent Action from Gandhi to the Present*. (Oxford: University Press, 2009) Hal 37

¹⁵ <http://www.mideastweb.org/Middle-East-Encyclopedia/plo.htm>

¹⁶Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements (Oslo I), Article I, September, 13, 1993

¹⁷ Ariel Sharon adalah Perdana Menteri Israel pada tahun 2000.

kerusuhan. Polisi melawan dengan menggunakan gas air mata dan peluru karet, sedangkan rakyat Palestina menggunakan batu. 25 orang Polisi Terluka dan 3 rakyat Palestina terluka dengan peluru karet¹⁸. Intifada kedua berakhir pada 8 Februari 2005¹⁹.

1.2. Rumusan Masalah

Robert.A.Dahl menjelaskan relasi kekuasaan dalam bentuk hubungan yang tidak seimbang (Asymetris) dimana satu pihak, yaitu pihak A mempunyai kuasa dalam menentukan atau mempengaruhi pihak B untuk melakukan sesuatu, dimana pihak B melakukan sesuatu tersebut terkadang diluar keinginannya sendiri²⁰. Kekuasaan yang didapat Israel setelah menduduki wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai akibat dari Perang Enam Hari membentuk relasi kekuasaan antara Palestina dan Israel yang tidak seimbang. Intifada adalah aksi yang lahir karena rasa tertekan Bangsa Palestina terhadap pendudukan Israel. Pada awalnya gerakan ini hanya terjadi disekitar Perkemahan Pengungsi Jibayyla, namun akhirnya meluas hingga diseluruh wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Aksi Intifada baru berhenti setelah Oslo Accord ditandatangani pada tahun 1993. Oslo Accord membuka kemungkinan lahirnya Negara Palestina yang berpotensi mempengaruhi relasi kekuasaan antara Palestina dan Israel. Hal ini menjadi menarik karena setelah pendudukan tahun 1967, PLO sebagai perwakilan resmi Bangsa Palestina telah berusaha untuk mendapatkan kekuasaan atas Bangsa Palestina dari Israel. Aksi Intifada yang dimulai pada tahun 1987 menjadi fenomena yang tidak pernah Israel hadapi sejak pendudukan tahun 1967, dan gerakan ini berpotensi

¹⁸2000: *'Provocative' mosque visit sparks riots,*
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/september/28/newsid_3687000/3687762.stm
diakses pada tanggal 26 september 2013 jam 11.46

¹⁹ "Israel". Encyclopædia Britannica

²⁰ *Ibid*, hal 3

mempunyai pengaruh dalam merubah relasi kekuasaan Palestina-Israel. Kemudian, pada tahun 2000 Intifada kembali terjadi. Merujuk pada Intifada Pertama kemungkinan Intifada Kedua juga mempunyai potensi dalam merubah relasi kekuasaan Palestina-Israel. Sehingga menarik untuk dikaji bagaimana pengaruh Intifada terhadap relasi kekuasaan Palestina-Israel.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan yang hendak dijawab melalui skripsi ini adalah *bagaimana pengaruh Intifada terhadap bentuk relasi kekuasaan Palestina-Israel?*

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan proses gerakan perlawanan Intifada terhadap bentuk relasi kekuasaan Palestina-Israel.
2. Mendeskripsikan pengaruh gerakan Intifada terhadap bentuk relasi kekuasaan Israel-Palestina.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara akademis memperluas kajian tentang pengaruh Intifada terhadap relasi kekuasaan Palestina-Israel.
2. Secara praksis menambah referensi tentang gerakan sosial dan perlawanan, terutama tentang gerakan perlawanan Intifada dalam relasi kekuasaan Israel-Palestina.

1.6. Studi Pustaka

Charles K. Rowley and Jennis Taylor dalam tulisannya yang berjudul *The Israel and Palestine Land Settlement Problem*²¹ menjelaskan secara ringkas bagaimana konflik Israel dan Palestina berawal. Konflik Israel-Palestina merupakan masalah tentang pendudukan kawasan dimana didalam kawasan tersebut terdapat situs yang dianggap suci oleh tiga agama yaitu Judaism, Islam, dan Kristen. Permasalahan sebenarnya adalah masalah pendudukan yang dilakukan oleh Israel yang melanggar batas wilayah daerah pengungsian masyarakat Israel yang terdiaspora dari seluruh dunia. Dalam tulisan ini dijelaskan rentetan dinamika konflik antara pasukan Israel yang berasal dari gabungan teroris Israel (Irgun, Lefi) serta warga Israel yang pernah tergabung dalam pasukan Yahudi ketika membantu pasukan Inggris saat Perang Dunia Kedua. Perang pun pecah antara pasukan Israel yang diperkirakan berjumlah sebanyak 100.000 orang melawan pasukan gabungan dari Negara-Negara Arab yaitu Mesir, Yordania, dan Syria dan mendapat dukungan penuh dari Irak serta Saudi Arabia. Mulai dari perang Enam hari hingga Perang Yom Kippur dimana pasukan gabungan Negara-Negara Arab kalah. Dari tulisan ini dapat dilihat bahwa masalah yang mengakar dari konflik Israel-Palestina adalah isu pendudukan wilayah.

Jim Lederman dalam tulisannya yang berjudul *Dateline West Bank: Interpreting the Intifada*,²² Dalam tulisan ini dijelaskan tentang pengertian dasar dari Intifada yang merupakan suatu gerakan perlawanan atau bangkitnya suatu gerakan perlawanan di daerah yang diduduki oleh Israel yang terjadi di daerah

²¹ Charles K. Rowley and Jennis Taylor, *The Israel and Palestine Land Settlement Problem*, Public Choice, Vol. 128, No. 1/2, The Political Economy of Terrorism (Jul., 2006), pp.77-90

²² Jim Lederman, *Dateline West Bank: Interpreting the Intifada*, Foreign Policy, No. 72 (Autumn, 1988), pp. 230-246

Tepi Barat dan Jalur Gaza. Kata Intifada sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti “mengguncang”. Semua struktur masyarakat yang berada di daerah tersebut melakukan perlawanan yang sama, perlawanan tidak hanya berfokus pada suatu titik tertentu seperti daerah perkotaan namun hingga ke desa-desa terpencil. Menurut Jim Lederman dasar dari Intifada adalah perlawanan yang dilakukan oleh para pemuda dari daerah Tepi Barat dan Jalur Gaza, perlawanan ini didasari perasaan akan tekanan Israel dan generasi sebelum mereka tidak dapat melakukan apa-apa dalam melawan Israel. Didalam tulisan ini juga disebutkan tidak ada satu grup atau badan-badan tertentu yang mendorong terjadinya revolusi dengan skala besar di Palestina. Israel menginginkan kepatuhan dan keteraturan sedangkan Negara-Negara Arab ingin menghindari hal-hal yang membuat terjadinya kegelisahan yang ada disekitar perbatasan negara mereka. PLO tidak ingin adanya ketidakseimbangan akan memunculkan pemimpin yang berasal dari warga setempat dan akan mengganggu pengaruh PLO. Namun, hal yang tidak disadari oleh pihak Israel maupun Negara-Negara Arab lainnya adalah tekanan serta paksaan yang terjadi di daerah Tepi Barat dan Jalur Gaza bisa mempengaruhi semua generasi, apalagi kaum pemuda. Inilah yang membuat banyak pihak terkejut saat Intifada pecah pada Desember 1987.

*Israeli Politics And the First Palestinian Intifada*²³ yang ditulis oleh Eitan Y. Alimi menjelaskan bagaimana rakyat Palestina di daerah yang dikuasai oleh Israel melakukan perlawanan terhadap pasukan militer Israel pada tahun 1987. Alimi menyatakan bahwa Intifada berbeda dengan gerakan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Palestina sebelumnya. Didalam buku ini dijelaskan awal

²³ Eitan Y. Alimi, *Israeli Politics And the First Palestinian Intifada*, (New York: Routledge, 2007)

kemunculan Intifada dipaparkan dalam berbagai macam dugaan, yang pertama, ketidakpuasan masyarakat Palestina terhadap peran Negara-Negara Arab atas konflik Israel Palestina. Lalu, kedua berasal dari masalah internal, tewasnya empat orang Palestina oleh truk militer Israel di Erez Military Checkpoint pada tanggal 8 Desember 1987. Ketiga, Intifada adalah Strategi aktivis grassroots di Gaza, yang dengan cepat menggerakkan massa melakukan perlawanan setelah PLO terusir dari Libanon pada tahun 1982, menunjukkan PLO sudah susah untuk diharapkan. Kemudian, yang keempat adalah Strategi dari aktivis lokal palestina menggunakan Intifada untuk menangkap perhatian dunia internasional.

Sedangkan dalam buku yang ditulis oleh *Ramzy Baroud* berjudul *A Second Palestinian Intifada A Cronicle of People Struggle*²⁴ yang merupakan sebuah catatan pengalamannya mengalami secara langsung Intifada Pertama. Melalui pengalamannya Ramzy menceritakan berbagai macam peristiwa yang dialaminya baik sebelum dan sesudah Intifada terjadi. Melalui buku ini dijelaskan bahwa Intifada menjadi peristiwa yang memberikan pengaruh besar dalam masyarakat baik dalam aspek sosial maupun pengaruhnya terhadap isu relasi Palestina dan Israel itu sendiri.

November 1981 gelombang protes terjadi disekitar Jalur Gaza, protes ini diikuti oleh orang-orang Palestina dari berbagai profesi mulai dari pengacara, dokter, dan profesi-profesinya. Protes ini terjadi karena hukum finansial baru yang diterapkan Israel, namun dalam beberapa jam saja protes ini segera dapat dihentikan. Lalu beberapa bulan kemudian pada bulan Maret 1982 gelombang kekerasan terjadi di seputaran Gaza, di Jerusalem Timur Enam warga Palestina

²⁴ Ramzy Baroud, *A Second Palestinian Intifada A Cronicle of People Struggle*, (London: Pluto Press, 2006)

meninggal serta satu tentara Israel. 31 Mei 1987 tentara Israel melakukan inspeksi jam malam di kamp pengungsian di Balata, awalnya para wanita yang berada di Kamp pengungsian tersebut melakukan perlawanan dan akhirnya diikuti oleh para pria, sehingga memaksa tentara Israel mundur dari kamp tersebut. Enam bulan kemudian, November 1987 gelombang kekerasan mencuat dari Kamp Jibaylla dimana untuk pertama kalinya gelombang massa yang begitu besar berusaha menerobos pagar pembatas dan melawan dengan batu serta tongkat.

Tulisan *Public Opinion and Political Change: Israel and the Intifada* yang ditulis oleh *Asher Arian, Michal Shamir and Raphael Ventura*²⁵ menjelaskan bagaimana opini dari publik dapat mempengaruhi sebuah perilaku politik. Dalam artikel ini akan menganalisis opini publik untuk menunjukkan kompleksitas dan multidimensionalisme dari perubahan opini publik. Artikel ini mengambil data dari 416 responden orang Yahudi dewasa yang menjadi dasar dari analisis. Gelombang pertama wawancara dilakukan pada tanggal 9 Desember 1987 (Hari dimana Intifada muncul), lalu pada tanggal 4 Januari 1988, yang Kedua dilaksanakan pada Oktober 1988. Dan dalam data yang diteliti tersebut menunjukkan bagaimana reaksi publik terhadap Intifada, Intifada membuat warga Israel dan pemimpin politik Israel lebih memikirkan bagaimana memperlakukan wilayah pendudukan secara lebih realistis tidak seperti yang mereka lakukan sebelum Intifada terjadi. Dapat dilihat juga dalam artikel ini opini publik Israel terhadap keamanan berubah setelah terjadi Intifada, lebih dari setengah koresponden merasa keamanan menjadi lebih buruk setelah terjadi Intifada. Begitu juga dengan perasaan aman yang dirasakan lebih dari 51% koresponden

²⁵ Asher Arian, Michal Shamir and Raphael Ventura, *Public Opinion and Political Change: Israel and the Intifada*, Comparative Politics, Vol. 24, No. 3 (Apr., 1992), pp. 317-334

yang merasa keamanan telah jauh berkurang semenjak Intifada muncul. Dapat dikatakan Intifada membawa efek yang besar pada publik Israel.

1.7. Kerangka Konseptual

1.7.1 Gerakan Sosial

Gerakan sosial menurut Herbert Blummerr adalah sebagai aksi kolektif sejumlah besar orang untuk menciptakan tatanan kehidupan baru atau menggapai tujuan atau gagasan bersama.²⁶ Gerakan sosial juga dapat dipahami sebagai bagaimana ide-ide, individu, peristiwa dan organisasi dihubungkan satu sama lain dalam proses yang lebih luas dari tindakan kolektif, dengan adanya kontinuitas dari waktu ke waktu.²⁷

Telah banyak gerakan sosial dalam sejarah yang secara dramatis mengubah masyarakat. Selanjutnya, karakteristik dari gerakan sosial adalah gerakan tersebut terlibat dalam hubungan yang bersifat konflik dengan sangat jelas berbeda posisi dan berbagi identitas kolektif yang jelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial adalah entitas sosial yang belum diorganisir secara formal yang terlibat dalam suatu konflik yang berorientasi pada suatu tujuan.²⁸ Gerakan sosial tidak terjadi begitu saja, ada syarat yang harus ada dan tingkatan-tingkatan yang dikembangkan. Ada Empat tahapan yang menjadikan gerakan sosial berkembang, yakni :²⁹

1. Emergence

²⁶ Herbert Blumer. *Social Movement: Critique, Concept, Case Studies*. (Washington: New York University Press, 1995)

²⁷ Donatella Della Porta and Mario Diani. *Social Movements An Introduction*. (UK: Blackwell publishing.2006), 5

²⁸ *Ibid.*, hal 4

²⁹ Jonathan Christiansen, M.A., *Four Stages of Social Movements*, EBSCO Research Starters, 2009, hal 2

Adanya potensi gerakan sosial yang muncul dari adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan serta kondisi sosial dan dapat memicu adanya perlawanan dari masyarakat, namun masyarakat sendiri belum ada mengambil tindakan untuk melawan secara kolektif, lebih kearah gerakan individual daripada aksi-aksi kolektif.

2. *Coalescence*

Pada level tindakan telah berubah menjadi aksi-aksi kolektif, masyarakat telah memiliki kesadaran bersama, seperti adanya demonstrasi serta aksi-aksi kolektif yang masal.

3. *Birokratisasi*

Pada level ini gerakan massa yang awalnya berlangsung di jalanan atau di ruang-ruang publik, mulai mempengaruhi ke dalam badan pemerintahan.

4. *Decline*

Decline adalah level terakhir dalam fase gerakan sosial, karena pada tahap ini gerakan sosial mulai berhenti. menurut Miller (1991) ada empat kemungkinan penyebab kemerosotan gerakan sosial, yaitu represi, kooptasi, sukses dan gagal³⁰ Melalui tahap-tahap ini dapat diketahui bagaimana gelombang gerakan kaum muda menjadi surut dengan empat kemungkinan yang dijelaskan oleh Miller³¹:

1. *Repression*

Represi terjadi ketika otoritas yang bertindak atas nama pemerintah menggunakan langkah-langkah (bisa juga melalui cara kekerasan) untuk

³⁰ Miller, F. D. (1999). The end of SDS and the emergence of weatherman: Demise through success. In J. Freeman & V. Johnson, (Eds.), *Waves of protest: Social movements since the Sixties* (pp. 303-324). Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, seperti dikutip dalam Christiansen, Jonathan. 2009. "Four Stages of Social Movements(EBSCO Publishing Inc.2009), 1-3

³¹ *Ibid*, 4

mengendalikan atau membubarkan sebuah gerakan sosial. Miller juga mengatakan bahwa:

“Repressive actions may be defined as legitimate by the state...but they are never legitimate from the perspective of movement”

Pernyataan diatas memperjelas bahwa pemerintah akan sering mengeluarkan undang-undang melarang aktivitas gerakan atau organisasi tertentu, atau membenarkan serangan terhadap gerakan dengan menyatakan dapat membahayakan ketertiban umum. Represi menjadikan gerakan sosial sulit untuk melaksanakan kegiatan mereka dan juga untuk merekrut keanggotaan baru. Seperti represi aktivitas gerakan sosial dimana otoritas AS melakukan represi terhadap banyak organisasi New Left pada akhir tahun 1960 dan awal tahun 1970an. Banyak gerakan dan para pemimpin gerakan tersebut yang dimata-matai, dipenjara dan bahkan dibunuh sebagai bagian dari upaya represif tersebut yang pada akhirnya berujung kepada surutnya gerakan.

2. *Co-optation*

Gerakan juga dapat surut jika organisasi mereka sangat tergantung pada otoritas terpusat atau pada kepemimpinan yang kharismatik, melalui kooptasi. Kooptasi terjadi ketika para pemimpin gerakan datang untuk berasosiasi dengan otoritas atau target lebih banyak dari daripada konstituen gerakan sosial.

3. *Success*

Gerakan lokal dengan tujuan yang sangat spesifik sering memunyai kesempatan yang lebih untuk sukses dalam tujuannya. Miller mengambil contoh yang terjadi pada *Student for a Democratic Society (SDS)*, yang merupakan organisasi mahasiswa yang muncul pada awal tahun 1960 dan mewakili banyak

ideologi mahasiswa dan memunculkan gerakan pemuda. Mereka menjadi salah satu basis organisasi pemuda yang mengorganisir protes menentang Perang Vietnam dan sekolah demokratisasi. Menurut Miller kesuksesan dan radikalisasi dari anggota SDS menyebabkan surutnya gerakan tersebut.

Kasus lainnya dimana setelah mencapai kesuksesan gerakan sosial meng re-orientasi ke tujuan baru setelah tujuan sebelumnya tercapai, yakni organisasi The March of Dimes yang dibentuk pada akhir tahun 1930-an sebagai sebuah gerakan untuk meningkatkan kesadaran dan bekerja untuk menyembuhkan penyakit polio. Setelah vaksin polio dikembangkan pada akhir tahun 1950-an , gerakan kembali berorientasi untuk tujuan yang lebih umum yaitu untuk mencegah cacat lahir, kelahiran prematur dan kematian bayi.

4. Failure

Kegagalan umum yang terjadi pada banyak organisasi adalah karena kegagalan strategi atau organisasi. Ada dua alasan yang menurut Miller menjadi alasan terjadinya kegagalan pada gerakan, yaitu faksionalisme dan enkapsulasi. Seperti pertumbuhan SDS, dimana adanya struktur terbuka dan setiap orang didorong untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan organisasi gerakan mulai dikuasai oleh faksi yang berbeda dan kelompok-kelompok tersebut menjadi picik dan mengarah kepada enkapsulasi. Proses enkapsulasi adalah dimana kader aktivis menjadi terisolasi dari gerakan yang lebih luas karena mereka datang untuk berbagi banyak kebiasaan yang sama dan budaya serta ideologi mereka menjadi lebih mirip satu sama lain dan pada saat yang sama menjadi lebih kaku.

Ada tiga tingkatan untuk melihat bagaimana *outcomes* dari suatu gerakan sosial, yakni³² :

1. Kebijakan

Munculnya kebijakan pemerintah sebagai tanggapan atas aksi dari gerakan sosial, dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut memungkinkan untuk menutup ataupun membuka jalan atas pengaruh gerakan sosial dan juga dapat menambah atau mengurangi tekanan gerakan sosial atas pemerintah tergantung dari langkah dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara.

2. Budaya

Gerakan sosial kontemporer menjadi agen utama dalam perubahan budaya, dan aktor dari gerakan sosial berusaha untuk mengubah budaya yang dominan. Seperti halnya gerakan perempuan dimana mereka berusaha untuk mengubah aturan mengenai pekerjaan perempuan dan posisi mereka di keluarga serta partisipasi mereka dalam militer. Perubahan budaya yang diangkat oleh gerakan sosial tidak hanya mempengaruhi lingkungan eksternal tapi juga dapat mempengaruhi gerakan sosial lainnya.

3. Partisipan

Gerakan sosial mempengaruhi individu yang berpartisipasi didalamnya, melalui partisipasinya dalam gerakan, individu membangun perspektif akan politik dan identitas mereka sendiri. Gerakan berusaha untuk memobilisasi individu untuk mengubah cara pandang mereka terhadap dunia,

³² David S. Meyer and Nancy Whittier. *Social Problems: Spillover Social Movement*.(University of California Press, Vol.41, No.2. 1994), 277-298

mereka membangun identitas kolektif selama periode puncak mobilisasi bahkan dapat bertahan hingga menurunnya aksi gerakan. Dengan mengubah cara pandang individu, gerakan sosial dapat mempengaruhi perubahan jangka panjang pada masyarakat dimana gerakan sosial juga dapat mempengaruhi sumber daya yang ada.

1.7.2. Perlawanan (*Resistance*)

Kekuasaan, sebagaimana yang dikemukakan Weber merupakan kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain walaupun ada penolakan melalui perlawanan³³. Perlawanan akan dilakukan oleh kelompok masyarakat atau individu yang merasa tertindas, frustrasi, dan hadirnya situasi ketidakadilan di tengah-tengah mereka³⁴. Jika situasi ketidakadilan dan rasa frustrasi ini mencapai puncaknya, akan menimbulkan aksi perlawanan, yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi menjadi kondisi yang berbeda dengan sebelumnya³⁵.

Definisi dari perlawanan yang paling umum dipakai berasal dari James J. Scott, yang menyatakan resistensi adalah bentuk aksi penolakan dan perlawanan dari pihak yang menolak dan melawan klaim (seperti pajak, biaya sewa, otoritas, kekuasaan) dari pihak penguasa (seperti tuan tanah atau negara)³⁶. Pile & Keith menyatakan resistensi sebagai aksi perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang sebagai bentuk perlawanan balik dari tekanan penguasa untuk mencapai

³³ Ritzer, George, 2000, *Sociological Theory*, Fifth edition, University Of Maryland.

³⁴ Zubir, Zaiyardam, 2002, *Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi tentang Ideologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan*, Insist Press, Yogyakarta.

³⁵ Tarrow, Sidney, 1994, *Power in Movement, Social Movement, Collective Action and Politics*, Cornell University.

³⁶ Stellan Vinthagen, "Understanding 'Resistance': Exploring definitions, perspectives, forms and implications",

kebebasan, kemerdekaan, dan demokrasi³⁷. Dapat disimpulkan resistensi adalah penolakan, perlawanan terhadap kekuasaan, dan resistensi juga dapat mempunyai tujuan dalam aksinya selain sebagai bentuk perlawanan balik dalam penjelasan Pile & Keith³⁸.

Scott mengkategorikan dua bentuk utama dari resistensi yaitu *public resistance* dan *disguised resistance*. Kedua kategori tersebut, oleh Scott, dibedakan atas artikulasi perlawanan; bentuk, karakteristik, wilayah sosial dan budaya. Perlawanan terbuka dikarakteristikan oleh adanya interaksi terbuka antara pihak yang melakukan perlawanan dengan pihak yang berkuasa. Sementara perlawanan sembunyi-sembunyi dikarakteristikan oleh adanya interaksi tertutup, tidak langsung antarpihak yang melakukan perlawanan dengan pihak penguasa³⁹.

Nonviolence Resistance adalah tipe resistensi, dimana kekerasan bukan sebagai senjata utama. *Nonviolence Resistance* adalah gerakan perlawanan yang melakukan tindakan nyata dalam melawan tekanan, ketidakadilan, eksploitasi, dan tirani. Merupakan gerakan perlawanan yang berasal dari masyarakat sipil yang menggunakan ekonomi, sosial, dan politik dalam bentuk perlawanannya tanpa menggunakan kekerasan sebagai bentuk perlawanan yang utama. Para pelaku gerakan *nonviolence resistance* menggunakan tiga hal sebagai bentuk senjata perlawanannya, tiga hal tersebut adalah protes, tidak berkooperasi (seperti melakukan boikot, ketidakpatuhan publik terhadap peraturan pihak yang berkuasa), dan melakukan gangguan pada fasilitas-fasilitas milik pihak yang berkuasa (seperti menduduki gedung pemerintahan, menyerang fasilitas atau benda-benda milik pemerintah yang berkuasa). *Nonviolence resistance* digunakan

³⁷Ibid, Hal.5

³⁸Ibid, Hal 5

³⁹Ibid, Hal 8

sebagai bentuk perlawanan dari pihak yang tertindas kepada pihak yang menindas⁴⁰.

1.7.3. Relasi Kekuasaan

Pemikiran modern tentang kekuasaan berawal dari tulisan Nicollo Machiavelli (*The Prince*) dan Thomas Hobbes (*Leviathan*), perbedaan dari tulisan mereka adalah perkembangan kekuasaan yang terus berlangsung hingga hari ini. Machiavelli menunjukkan strategi dan desentralisasi pemikiran tentang kekuasaan dan organisasi. Sedangkan Hobbes melihat kekuasaan sebagai hegemoni dan fokus pada kedaulatan. Setelah perang dunia yang Kedua, ilmu sosial makin berkembang, Max Weber (1947) melakukan pendekatan pada kekuasaan dibirokrasi. Robert Dahl (1961) meneruskan pendekatan yang dilakukan Weber, jika Weber membicarakan kekuasaan dalam konteks organisasi dan struktur, maka Dahl membicarakannya dalam batasan-batasan komunitas aktual.

Menurut Gene Sharp orang-orang dalam kehidupan sosial terbagi menjadi dua yaitu yang ‘memerintah’ dan yang menjadi ‘subjek’, pihak yang ‘memerintah’ yang mempunyai power atau kekuasaan. Gene Sharp menfokuskan pada bentuk power negara dalam analisisnya. Pihak yang memerintah yang mempunyai kekuasaan atau power tersebut tidak terbatas pada kepala pemerintahan dari suatu negara namun pihak yang ‘memerintah’ juga termaksud struktur yang ada didalam negara seperti polisi dan militer, dan kelompok-kelompok yang berada dibawah komando seorang individu atau kelompok yang menempati posisi kepala dari

⁴⁰Gene Sharp, *The Politics of nonviolent action volume I : Power and Struggle*, Boston M.A 1973 dikutip dari Lester Kurtz , *Nonviolent Conflict and Civil Resistance: Introduction*, George Mason University, Hal.xiv

suatu negara adalah pihak yang ‘memerintah’. Selain pihak yang ‘memerintah’ salah bagian dari ‘subjek’⁴¹.

Menurut Robert A. Dahl, kekuasaan adalah hubungan antara orang-orang, bisa berupa hubungan antara dua orang atau lebih. Salah satu pihak atau orang tersebut memiliki kekuatan atau kekuasaan yang lebih dari pihak atau orang lainnya yang membenruk hubungan atau relasi⁴². Robert.A.Dahl menjelaskan relasi kekuasaan adalah bentuk hubungan yang tidak seimbang (Asymetris) dimana satu pihak, yaitu pihak A mempunyai kuasa dalam menentukan atau mempengaruhi pihak B untuk melakukan sesuatu, dimana pihak B melakukan sesuatu tersebut terkadang diluar keinginannya sendiri. Pihak A mempunyai kekuasaan atas pihak B karena pihak A mempunyai akses yang lebih *superior* atas pihak B. akses-akses tersebut dapat berupa persenjataan, status sosial, jabatan dan lain-lain.⁴³

Menurut John Gaventa kekuasaan digunakan untuk menghalangi suatu kelompok untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan untuk mendapatkan kesepakatan pasif dari kelompok tersebut. Kesepakatan pasif yang dimaksud bukan keinginan untuk tidak ikut terlibat dalam proses kebijakan, namun adalah bentuk penghalangan dalam proses kebijakan terhadap kelompok tersebut. Kekerasan dan pemberontakan muncul karena keinginan kelompok untuk berpartisipasi dalam partisipasi dalam pembuatan kebijakan atau juga

⁴¹ Brian Martin, “Gene Sharp's Theory of Power”, *Journal of Peace Research*, vol. 26, no. 2, 1989, Hal.213

⁴² Robert A. Dahl, *The Concept of Power*, Department of Political Science, Yale University (1957), hal 3

⁴³ *Ibid*, hal 3

sebagai bentuk penolakan. Menurut Gaventa relasi kekuasaan dapat dilihat dalam tiga dimensi relasi kekuasaan : ⁴⁴

a. Relasi Kekuasaan Satu Dimensi

Dalam relasi kekuasaan satu dimensi adalah saat pihak A mempunyai kekuasaan melebihi pihak B, hingga pihak A dapat membuat pihak B melakukan sesuatu, dan pihak B sadar tentang tekanan yang dilakukan pihak A terhadap pihak B. Kekuasaan dalam dimensi pertama adalah para aktor akan menggunakan kemampuan serta sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai kekuasaan. Sumberdaya tersebut adalah kekuatan organisasi, status sosial, persenjataan, dan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang dapat dimaksimalkan oleh para aktor. Dapat diartikan pihak A dan pihak B akan saling berusaha memaksimalkan sumberdaya dalam mencapai kekuasaan⁴⁵. Mekanisme kekuasaan yang ada didalam relasi kekuasaan satu dimensi adalah para aktor-aktor yang berusaha mencapai kekuasaan dengan cara menggunakan dan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang dapat dimanfaatkan oleh masing-masing aktor. Sumberdaya tersebut dapat berbentuk kemampuan bernegosiasi, posisi politik, militer, dan lainnya. Pihak A dan pihak B masing-masing akan berusaha untuk mencapai kekuasaan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang dapat dimanfaatkan oleh pihak A maupun pihak B⁴⁶.

⁴⁴ Elisheva Sadan. *Empowerment and Community Planning: Theory and Practice of People-Focused Social Solutions*. Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad Publishers (1997) Hal.39

⁴⁵ Elisheva Sadan. *Empowerment and Community Planning: Theory and Practice of People-Focused Social Solutions*. Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad Publishers (1997) Hal.42

⁴⁶ John Gaventa, *Power and Powerlessness : Quiescence and Rebellion in an Appalachian Valley* , Clarendon Press Oxford, 1980, Hal.13

b. Relasi Kekuasaan Dua Dimensi

Dalam dimensi yang kedua para aktor tidak hanya berusaha untuk menang dalam proses kebijakan namun juga berusaha menghalangi aktor atau subjek lainnya terlibat dalam proses kebijakan. Pihak A bukan hanya sekedar berusaha untuk mendominasi pihak B namun juga berusaha menghalang-halangi pihak B untuk lepas dari tekanan pihak A⁴⁷. Mekanisme dalam dimensi ini adalah saat pihak A akan menggunakan kebijakan, kekuatan militer, dan hal lainnya untuk menghalangi pihak B mencapai kekuasaan.

c. Relasi Kekuasaan Tiga Dimensi

Dalam dimensi ini pihak B sebagai pihak yang ditekan pihak A untuk melakukan sesuatu diluar keinginannya, melakukan hal-hal yang pihak B tidak dapat lakukan sebelumnya karena pengaruh dari pihak A. dalam dimensi ini relasi kekuasaan yang tidak seimbang karena A yang dapat membuat B melakukan sesuatu diluar keinginannya, dapat melakukan hal-hal yang selama ini ditekan dan dihalang-halangi pihak A⁴⁸.

1.8. Metodologi

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis⁴⁹. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu⁵⁰.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana metode penelitian kualitatif digunakan untuk

⁴⁷*Ibid*, Hal.41

⁴⁸*Ibid*, Hal.42

⁴⁹ Prof. Dr. Husaini Usman and Purnomo setiady akbar, metodologi penelitian sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) hal 41

⁵⁰ Prof.Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011)

menjelaskan suatu fenomena atau gejala sosial yang kompleks. Dimana gejala sosial tersebut dihubungkan dengan nilai – nilai ideal, norma – norma serta prakteknya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data adalah dengan studi dokumentasi pustaka. Data-data dikumpulkan dari berbagai sumber baik jurnal, buku, maupun dari situs-situs yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Setelah data dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisa untuk menemukan kesimpulan dalam penelitian ini.

1.8.1. Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah dari tahun 1987-2005. Hal ini menjadi penting, sebab pada tahun 1987 merupakan tahun dimana Intifada I dimulai dan berakhir pada tahun 1993, serta dapat dilihat pengaruh Intifada terhadap relasi kekuasaan Palestina-Israel dari tahun 1993-2000. Sedangkan dari tahun 2000-2005 adalah periode dimana Intifada II terjadi dan melihat pengaruhnya terhadap relasi kekuasaan Palestina-Israel.

1.8.2. Unit Analisis dan Tingkat Analisis

Unit analisa merupakan unit yang perilakunya hendak dideskripsikan, dijelaskan, dan diramalkan⁵¹. Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah Intifada. Adapun tingkat analisa dalam penelitian ini adalah negara-bangsa.

⁵¹ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional – Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta:LP3ES, 1990) hal 35

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang didapat dari berbagai sumber tertulis, seperti beberapa penelitian, buku, bahan bacaan dan jurnal ilmiah lainnya terkait pembahasan mengenai Intifada sebagai gerakan perlawanan bangsa Palestina.

Penulis mendapatkan informasi / data dan berita terkait dari beberapa literatur seperti jurnal ilmiah dan laporan resmi. Kemudian penulis juga mendapatkan informasi juga didapat dari beberapa pernyataan pemimpin negara yang dimuat dalam pemberitaan lokal maupun internasional seperti: Viva News (<http://dunia.news.viva.co.id>) BBC News (<http://www.bbc.co.uk>), The New York Times (<http://www.nytimes.com>).

Informasi-informasi yang didapat oleh penulis diseleksi sehingga sumber dan informasi yang dianggap relevan dapat diolah dan menghasilkan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

1.8.4 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Pada penelitian ini, data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber diklasifikasikan, diinterpretasikan dan disusun untuk dianalisis. Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola dan memilih mana yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami

1.9. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang peneliti ajukan adalah :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Intifada dan Dinamika Hubungan Palestina-Israel

Bab ini berisi tentang pendalaman tentang pengertian Intifada, kemudian pada bab ini pula dijelaskan bagaimana hubungan dari Palestina-Israel

BAB III: Pengaruh Intifada terhadap Bentuk Relasi Kekuasaan Palestina-Israel

Bab ini berisi tentang penjelasan Intifada dan pengaruhnya dalam Relasi Kekuasaan

BAB IV: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran